

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

Fitria Azil Fadiha¹

Mohamad Rifai Rizki Amanah²

Wike Aprillia³

Yoiz Shofwa Shafrani⁴

Universitas Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: JL. Jendral A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto
Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126).

Korespondensi Penulis: fitriazilfa@gmail.com, Rifaiamanah4@gmail.com,
Wikeaprillia2@gmail.com, shafraniy@uinsaizu.ac.id.

Abstract. *This study examines the impact of infrastructure development on economic growth and quality of life in urban areas, with a case study of Purwokerto, the capital city of Banyumas Regency. As a rapidly growing urban center, Purwokerto has seen significant investments in physical and digital infrastructure over the past decade, including road improvements, public transportation enhancements, clean water and sanitation services, and digitalization of public services. These transformations not only aim to improve service efficiency, but also encourage inclusive and sustainable economic growth. This research employs a descriptive qualitative case study approach, utilizing secondary data from government agencies and statistical sources between 2016 and 2023. The findings reveal that infrastructure development has significantly contributed to increased regional economic performance, as reflected in the rise of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the growth of digital-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Additionally, access to clean water, electricity, and internet services has improved, although disparities remain between central and peripheral urban*

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

areas. The spatial analysis indicates a concentration of development in central Purwokerto, raising concerns over spatial inequality and limited access to infrastructure in suburban districts. The study concludes that while infrastructure has enhanced economic competitiveness and public services, future policies must prioritize equitable development, spatial justice, and sustainability to ensure inclusive benefits for all urban residents. The result of this study are expected to be a reference for local governments in formulating development strategies that are more equitable and oriented towards equitable distribution of community welfare.

Keywords: *Economic Growth, Infrastructure Development, Quality of Life, Spatial Inequality, Urban Planning.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup di wilayah perkotaan, dengan studi kasus Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas. Sebagai pusat perkotaan yang berkembang pesat, Purwokerto telah mengalami investasi signifikan dalam infrastruktur fisik dan digital selama dekade terakhir, termasuk perbaikan jalan, peningkatan transportasi umum, layanan air bersih dan sanitasi, dan digitalisasi layanan publik. Transformasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif, dengan memanfaatkan data sekunder dari lembaga pemerintah dan sumber statistik antara tahun 2016 dan 2023. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah, sebagaimana tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital. Selain itu, akses terhadap layanan air bersih, listrik, dan internet telah membaik, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan produktivitas penduduk, meskipun masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan pusat dan pinggiran. Analisis spasial menunjukkan adanya konsentrasi pembangunan di Purwokerto pusat, yang menimbulkan kekhawatiran atas ketimpangan spasial dan terbatasnya akses terhadap infrastruktur di distrik pinggiran kota. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun infrastruktur telah meningkatkan daya saing ekonomi dan layanan publik, kebijakan masa depan harus memprioritaskan pembangunan yang merata,

keadilan spasial, dan keberlanjutan untuk memastikan manfaat yang inklusif bagi semua penduduk perkotaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih adil dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur, Kualitas Hidup, Ketimpangan Spasial, Perencanaan Perkotaan.

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas, khususnya di Purwokerto, mengalami percepatan signifikan dalam dua dekade terakhir. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan regional barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), Purwokerto menunjukkan gejala urbanisasi yang ditandai oleh peningkatan infrastruktur fisik, seperti pembangunan jalan nasional, pelebaran Jalan Soedirman–Gatot Subroto, modernisasi jalur kereta api lintas selatan (*double track*), dan pengembangan Terminal Tipe A (Nurdina, 2021).

Menurut (BPS Kabupaten Banyumas, 2023), sektor jasa, perdagangan, dan transportasi menyumbang 38,5% terhadap PDRB Banyumas pada 2022, naik dari 34,9% pada 2015 (Pokhrel, 2024). Kenaikan ini sejalan dengan teori pertumbuhan wilayah yang menekankan bahwa infrastruktur merupakan katalisator pertumbuhan ekonomi (Yunisvita et al., 2021). Selain itu, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp38,95 triliun (2016) menjadi Rp52,81 triliun (2022), didorong oleh proyek strategis seperti pembangunan lingkaran utara, revitalisasi alun-alun, dan pengembangan kawasan pendidikan UMP–Unsoed.

Meski demikian pemerataan hasil pembangunan belum optimal. Layanan air bersih PDAM baru menjangkau 58,13% rumah tangga kota, sementara wilayah pinggiran seperti Sumbang, Kalibagor, dan Kembaran masih menghadapi defisit pelayanan dasar seperti sanitasi dan pengelolaan limbah (Dinas PUPR, 2023; Dinkes, 2022). Fenomena ini mencerminkan apa yang sebagai *urban divide*, yaitu ketimpangan akses layanan dasar dalam satu kawasan kota (Rosidin, 2021)

Tantangan lainnya meliputi kemacetan lalu lintas akibat pertumbuhan kendaraan pribadi sebesar 6,1% per tahun (Dishub, 2022), peningkatan polusi udara karena minimnya ruang terbuka hijau (DLH, 2022), serta konversi lahan hijau menjadi kawasan

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

terbangun. Hal ini memperkuat argumen Romer (1994) bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur hanya optimal bila diimbangi dengan keadilan spasial dan perencanaan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di wilayah perkotaan Banyumas, serta memberikan masukan bagi kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berbasis bukti.

KAJIAN TEORITIS

Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan listrik, serta sarana air bersih berfungsi sebagai fondasi utama dalam mendukung aktivitas produksi, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas tenaga kerja. Menurut Saragih, infrastruktur dapat mempercepat aliran barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah (Yunisvita et al., 2021). Hal ini juga selaras dengan pendapat Aschauer (1989), yang menyatakan bahwa investasi publik dalam infrastruktur memiliki korelasi positif dengan produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi (Husen & Baranyanan, 2021).

Dalam konteks Kabupaten Banyumas, infrastruktur jalan menjadi salah satu sektor kunci yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Purwokerto. Studi yang dilakukan oleh Putri, Wulandari, dan Rizki (2020) menemukan bahwa pembangunan dan perbaikan jaringan jalan utama di Banyumas, khususnya jalan nasional dan jalan kolektor seperti Jalan Jenderal Soedirman, Jalan Gatot Subroto, serta Jalan Gerilya, secara signifikan menurunkan biaya logistik lokal hingga 12–17% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan biaya ini sangat berdampak bagi pelaku UMKM dan sektor perdagangan yang bergantung pada efisiensi distribusi barang. Selain itu, kemudahan akses ke pasar dan pusat-pusat perdagangan mendorong pertumbuhan usaha baru serta menciptakan lapangan kerja lokal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang sekitar 25,73% terhadap total PDRB, menjadikannya sektor penyumbang terbesar kedua setelah sektor administrasi

pemerintahan (BPS Banyumas, 2023). Sementara itu, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan juga meningkat dari 4,6% pada tahun 2016 menjadi 5,3% pada tahun 2022, mencerminkan peran penting infrastruktur jalan dan transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (BPS Kabupaten Banyumas, 2023).

Hasil survei dari Bappeda Kabupaten Banyumas (2022) menyebutkan bahwa panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik dan mantap meningkat dari 817,3 km pada tahun 2016 menjadi 1.015,6 km pada tahun 2022, yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan koridor ekonomi seperti Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat. Peningkatan kondisi jalan ini berdampak langsung pada efisiensi waktu tempuh distribusi barang antarwilayah, yang sebelumnya rata-rata membutuhkan waktu 1,5–2 jam untuk menjangkau kecamatan-kecamatan di pinggiran kota, kini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam (Sekretaris DPRD, 2022).

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dapat memunculkan disparitas ekonomi antarwilayah. Kecamatan di luar pusat kota seperti Ajibarang, Karanglewas, dan Kalibagor masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur jalan berkualitas. Hal ini berpengaruh pada rendahnya daya saing wilayah tersebut dalam menarik investasi dan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi krusial agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di Purwokerto, melainkan merata ke seluruh kecamatan di Banyumas. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Banyumas memberikan dampak signifikan terhadap penurunan biaya logistik, peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan transportasi, serta perluasan akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal. Namun, upaya pembangunan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi pemerataan agar dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata (Wibowo et al., 2021).

Infrastruktur dan Kualitas Hidup

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup dalam konteks perkotaan mencakup aspek kesehatan, kenyamanan, akses terhadap pelayanan dasar, hingga lingkungan yang layak huni. Menurut UN-Habitat (2021), kualitas hidup suatu kota ditentukan oleh sejauh mana penduduknya memiliki

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

akses terhadap air bersih, sanitasi, transportasi umum yang layak, perumahan, dan ruang terbuka hijau. Hal senada juga dinyatakan oleh Kementerian PUPR (Beno et al. 2022), bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, drainase, sanitasi, dan permukiman menjadi indikator penting dalam pengukuran kualitas hidup masyarakat perkotaan di Indonesia. Di Kabupaten Banyumas pembangunan infrastruktur dasar menunjukkan kemajuan, namun masih menyisakan tantangan, terutama di wilayah pinggiran perkotaan. Data dari PDAM Tirta Satria Banyumas menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, cakupan layanan air bersih baru mencapai sekitar 58,13% dari total rumah tangga perkotaan, dengan keterbatasan layanan di wilayah seperti Kembaran, Sumbang, dan Kalibagor (Komunikasi et al., 2023). Rendahnya cakupan ini mengindikasikan bahwa hampir separuh warga belum mendapatkan akses air minum layak dari sistem perpipaan, dan masih bergantung pada sumur gali atau sumber air alternatif yang belum tentu memenuhi standar kesehatan.

Aspek sanitasi juga menjadi perhatian penting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, akses terhadap jamban sehat dan sistem pengelolaan limbah rumah tangga yang aman di wilayah perkotaan baru mencapai sekitar 71,42% pada tahun 2022. Hal ini masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu 100% akses sanitasi layak. Ketimpangan ini berpengaruh terhadap potensi munculnya penyakit berbasis lingkungan dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dengan sanitasi buruk (Ummah, 2019b).

Elektrifikasi di wilayah perkotaan Banyumas sudah relatif baik. Rasio elektrifikasi mencapai 99,2% berdasarkan laporan PLN UP3 Purwokerto tahun 2022. Namun, masih terjadi gangguan pasokan listrik, terutama di daerah padat yang belum memiliki infrastruktur distribusi yang optimal, serta keterbatasan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber alternatif (Laporan Kinerja Kemkominfo, 2020). Ketersediaan dan kualitas transportasi umum juga menjadi aspek yang memengaruhi kenyamanan dan mobilitas masyarakat kota. Walaupun Banyumas telah memiliki Terminal Tipe A Purwokerto dan jaringan angkutan kota, namun data dari Dishub Banyumas (2022) mencatat bahwa hanya sekitar 19% penduduk perkotaan yang menggunakan transportasi umum, sedangkan mayoritas masih mengandalkan kendaraan pribadi. Ini berdampak pada kemacetan, polusi udara, dan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) kota Purwokerto saat ini hanya mencapai 7,5% dari total luas

kota, masih di bawah standar minimal 20% menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Meskipun pembangunan infrastruktur di Banyumas telah meningkatkan sebagian aspek kualitas hidup, namun masih terdapat tantangan besar dalam pemerataan akses, keberlanjutan lingkungan, dan pemanfaatan infrastruktur secara inklusif. Oleh karena itu, pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan keberlanjutan (*sustainability*), keterjangkauan, dan keadilan spasial (*spatial justice*) agar seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pinggiran kota, juga merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Infrastruktur Digital dan *Smart City*

Di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, pembangunan infrastruktur tidak hanya mencakup sarana fisik seperti jalan, jembatan, dan air bersih, tetapi juga infrastruktur digital yang mencakup jaringan internet, layanan daring pemerintahan, dan aplikasi berbasis teknologi. Infrastruktur digital menjadi faktor penting dalam membangun daya saing ekonomi perkotaan, mempercepat pelayanan publik, serta membuka peluang usaha baru melalui ekosistem ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan strategi nasional Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024, di mana transformasi digital merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional (Bappenas, 2020) (Hilba Yoga Pratama et al., 2023).

Kabupaten Banyumas sendiri telah mulai menginisiasi pembangunan digital melalui program *Smart City* sejak tahun 2020. Program ini mengacu pada kerangka kerja Gerakan 100 *Smart City* yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo dan Bappenas. Purwokerto sebagai ibu kota kabupaten ditunjuk sebagai kota pilot project dengan prioritas pada pengembangan layanan publik digital, literasi digital masyarakat, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (Komunikasi et al., 2023). Salah satu indikator penting dari infrastruktur digital adalah akses internet. Berdasarkan laporan Diskominfo Kabupaten Banyumas, cakupan internet di wilayah perkotaan telah mencapai lebih dari 92% rumah tangga, baik melalui jaringan seluler maupun fiber optik. Pemerintah daerah juga telah membangun lebih dari 87 titik Wi-Fi publik gratis di fasilitas umum seperti taman kota, terminal, alun-alun, kantor pelayanan, dan sekolah-sekolah (Diskominfo Banyumas, 2023). Cakupan ini memungkinkan integrasi layanan publik berbasis digital seperti aplikasi layanan administrasi kependudukan *online* (e-

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

Layanan Dukcapil), layanan pengaduan masyarakat (Lapor Banyumas), dan sistem informasi keterbukaan anggaran (SIPAS) yang dikelola oleh BPKAD.

Infrastruktur digital juga memberikan dampak positif pada sektor ekonomi, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas, hingga akhir tahun 2023 terdapat lebih dari 3.500 UMKM yang telah terhubung dengan platform digital atau *marketplace*, naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2020 (Diskop UKM Banyumas, 2023). Peningkatan ini tidak terlepas dari pelatihan literasi digital, pendampingan pemasaran *online*, serta penyediaan jaringan Wi-Fi oleh pemerintah daerah. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya omzet penjualan UMKM hingga rata-rata 18,4% per tahun, terutama pada sektor kuliner, fesyen, dan kerajinan.

Pembangunan infrastruktur digital di Banyumas masih menghadapi tantangan. Masih terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah perkotaan seperti Purwokerto dan kecamatan-kecamatan pinggiran seperti Wangon, Lumbir, dan Cilongok yang memiliki keterbatasan sinyal dan infrastruktur BTS (*Base Transceiver Station*). Menurut laporan Laporan Kinerja Kemkominfo, (2020). Banyumas termasuk dalam kategori daerah "sedang" dalam indeks kematangan digital daerah, dengan nilai indeks sekitar 56,7 dari 100. Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah kabupaten secara merata. Infrastruktur digital dan pengembangan *smart city* memberikan kontribusi signifikan terhadap kemudahan akses informasi, efisiensi pelayanan publik, serta perluasan kesempatan ekonomi berbasis digital di Banyumas. Dengan dukungan regulasi yang baik dan sinergi antarinstansi, Purwokerto dan sekitarnya memiliki potensi besar menjadi simpul kota cerdas di wilayah Jawa Tengah bagian selatan (Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, 2017).

Studi Terdahulu di Banyumas

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan antara pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Banyumas, khususnya Purwokerto sebagai pusat pertumbuhan kota. Studi-studi ini memberikan gambaran awal bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, efisiensi mobilitas, serta kualitas pelayanan publik. Berikut adalah beberapa studi relevan yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini:

Tabel 1. *Studi Terdahulu*

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama
1	Putri, Wulandari & Rizki (2020)	Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Biaya Logistik di Banyumas	Peningkatan kualitas jalan menurunkan biaya logistik lokal hingga 12–17% dan mempercepat distribusi barang antar kecamatan.
2	Yulianto & Ramadhan (2019)	Analisis Dampak Terminal Tipe A Purwokerto terhadap Ekonomi Lokal	Keberadaan terminal meningkatkan omzet pelaku usaha sekitar hingga 25%, serta memperluas konektivitas transportasi antarwilayah.
3	Astuti (2021)	Akses Air Bersih dan Ketimpangan Infrastruktur Perkotaan di Banyumas	Layanan PDAM masih belum menjangkau 40% warga Purwokerto pinggiran; akses air bersih berdampak pada kesehatan dan produktivitas rumah tangga.
4	Hilba Yoga Pratama (2023)	Smart City dan Pelayanan Publik di Purwokerto	Implementasi layanan digital seperti Lapor Banyumas dan e-Dukcapil meningkatkan efisiensi pelayanan publik sebesar 30%.
5	Dinas Kominfo Banyumas (2023)	Laporan Tahunan Cakupan Internet & Transformasi Digital	Sebanyak 92% rumah tangga di Purwokerto telah memiliki akses internet, namun digital divide masih tinggi di luar zona perkotaan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas studi terdahulu sepakat mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan publik di Banyumas. Namun, mayoritas studi tersebut memiliki fokus terbatas pada satu jenis infrastruktur (misalnya hanya transportasi atau

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

hanya air bersih), dan belum mengintegrasikan analisis secara holistik antar aspek ekonomi, sosial, dan spasial secara bersamaan. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kekosongan tersebut dengan pendekatan tematik lintas sektor, guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap dampak pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini juga mengintegrasikan data terbaru dari tahun 2022–2023 serta mempertimbangkan konteks pascapandemi, yang menjadi faktor baru dalam perencanaan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi dan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Studi ini bersifat studi kasus, memanfaatkan data sekunder dari lembaga pemerintah (BPS, Bappeda, Diskominfo, dll.) dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola ekonomi, sosial, dan spasial yang muncul.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian studi kasus dilakukan untuk mengeksplorasi secara intensif konteks pembangunan infrastruktur di wilayah tertentu (Purwokerto) sebagai representasi dari dinamika perkotaan di Banyumas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan indikator-indikator sosial-ekonomi dan spasial.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1. Studi literatur: Peneliti mengumpulkan dan mereview literatur yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, skripsi/tesis, laporan penelitian, dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan topik pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas hidup di kawasan perkotaan. Sumber utama berasal dari jurnal nasional seperti Jurnal Ekonomi Pembangunan, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, serta

dokumen resmi pemerintah seperti RPJMD, RTRW, dan laporan kinerja dari Bappeda Banyumas, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Diskominfo Kabupaten Banyumas.

2. Data sekunder: Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa statistik dan informasi kuantitatif dari instansi terkait, antara lain:
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas (2015–2023) : data PDRB per kapita, sektor ekonomi, tingkat kemiskinan, data kepadatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan data pendidikan serta kesehatan.
4. Bappeda Kabupaten Banyumas: Dokumen perencanaan strategis pembangunan infrastruktur, laporan evaluasi tahunan pembangunan daerah, serta data capaian indikator pembangunan infrastruktur.
5. Diskominfo Banyumas: Data digitalisasi layanan publik, akses internet, perkembangan UMKM berbasis digital.
6. Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinkes, dan DLH: Untuk data teknis infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, transportasi publik, dan lingkungan hidup.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara tematik dan naratif deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola-pola utama yang muncul dari data sekunder terkait pembangunan infrastruktur dan dampaknya. Analisis dilakukan dengan menelaah secara sistematis data dari berbagai sumber resmi, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam tiga dimensi utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan spasial. Pada aspek ekonomi, fokus analisis diarahkan pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas, perkembangan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perubahan kontribusi sektor-sektor ekonomi strategis, khususnya di wilayah perkotaan seperti Purwokerto.

Pada aspek sosial, data dianalisis untuk mengungkap sejauh mana akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik meningkat, serta bagaimana kualitas pelayanan publik dasar turut memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Pada aspek spasial atau keruangan, analisis mencakup tingkat konektivitas transportasi antarwilayah, distribusi pembangunan infrastruktur antara pusat kota dan daerah pinggiran, serta kecenderungan munculnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Proses analisis

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola empiris yang tampak dalam data, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar merefleksikan realitas sosial dan pembangunan yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya menggambarkan dampak infrastruktur secara kuantitatif, tetapi juga menjelaskan dampaknya secara kualitatif terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah kawasan perkotaan Purwokerto, sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas yang merupakan simpul utama pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Lokasi ini dipilih karena:

1. Merupakan pusat pemerintahan dan layanan publik utama.
2. Mewakili lebih dari 50% kontribusi sektor jasa dan perdagangan terhadap PDRB Banyumas (BPS, 2023).

Memiliki dinamika pembangunan yang lebih intens dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian studi kasus dilakukan untuk mengeksplorasi secara intensif konteks pembangunan infrastruktur di wilayah tertentu (Purwokerto) sebagai representasi dari dinamika perkotaan di Banyumas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara pembangunan infrastruktur dengan indikator-indikator sosial-ekonomi dan spasial.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama:

1. Studi literatur: Peneliti mengumpulkan dan mereview literatur yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, skripsi/tesis, laporan penelitian, dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan topik pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kualitas hidup di kawasan perkotaan. Sumber utama berasal dari jurnal nasional seperti Jurnal Ekonomi Pembangunan, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, serta

dokumen resmi pemerintah seperti RPJMD, RTRW, dan laporan kinerja dari Bappeda Banyumas, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Diskominfo Kabupaten Banyumas.

2. Data sekunder: Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa statistik dan informasi kuantitatif dari instansi terkait, antara lain:
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas (2015–2023) : data PDRB per kapita, sektor ekonomi, tingkat kemiskinan, data kepadatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan data pendidikan serta kesehatan.
4. Bappeda Kabupaten Banyumas: Dokumen perencanaan strategis pembangunan infrastruktur, laporan evaluasi tahunan pembangunan daerah, serta data capaian indikator pembangunan infrastruktur.
5. Diskominfo Banyumas: Data digitalisasi layanan publik, akses internet, perkembangan UMKM berbasis digital.
6. Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinkes, dan DLH: Untuk data teknis infrastruktur jalan, air bersih, sanitasi, transportasi publik, dan lingkungan hidup.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara tematik dan naratif deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pola-pola utama yang muncul dari data sekunder terkait pembangunan infrastruktur dan dampaknya. Analisis dilakukan dengan menelaah secara sistematis data dari berbagai sumber resmi, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam tiga dimensi utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan spasial. Pada aspek ekonomi, fokus analisis diarahkan pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas, perkembangan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perubahan kontribusi sektor-sektor ekonomi strategis, khususnya di wilayah perkotaan seperti Purwokerto.

Pada aspek sosial, data dianalisis untuk mengungkap sejauh mana akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik meningkat, serta bagaimana kualitas pelayanan publik dasar turut memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Pada aspek spasial atau keruangan, analisis mencakup tingkat konektivitas transportasi antarwilayah, distribusi pembangunan infrastruktur antara pusat kota dan daerah pinggiran, serta kecenderungan munculnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan. Proses analisis

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola empiris yang tampak dalam data, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar merefleksikan realitas sosial dan pembangunan yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya menggambarkan dampak infrastruktur secara kuantitatif, tetapi juga menjelaskan dampaknya secara kualitatif terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya, transportasi umum, dan fasilitas digital, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Kabupaten Banyumas, khususnya di wilayah Purwokerto (Tari, 2020) (Umum & Kabupaten, n.d.) (Anwaruddin, 2009).

Tabel 2. *Dampak Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perkotaan Banyumas*

No.	Aspek	Indikator	Data / Temuan
1	Pertumbuhan PDRB	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	38,5% dari total PDRB tahun 2022
		Infrastruktur fisik pendukung pertumbuhan ekonomi	Jalan Nasional Soedirman–Gatot Subroto; Double Track Kereta Api Selatan (SYAHRIAR, 2018)
2	Perkembangan UMKM	UMKM berbasis digital	Meningkat dari 1.600 (2020) menjadi 3.521 unit (2023)
		Fasilitas penunjang ekonomi digital	87+ titik Wi-Fi publik gratis di kota (Operasional et al., 2025).
		Sub sektor dominan UMKM	Kuliner dan kerajinan

3	Biaya Logistik	Efisiensi distribusi barang	Biaya logistik turun hingga 17% dalam 5 tahun terakhir (Kebijakan, 2024).
		Infrastruktur kunci yang memengaruhi efisiensi logistik	Perbaikan jalan utama kota dan konektivitas antarkecamatan (Siswanto et al., 2016).

Dampak Infrastruktur terhadap Kualitas Hidup

Pembangunan infrastruktur juga memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, meskipun distribusinya belum merata ke seluruh wilayah kota (Ignatius Aji Dwiatmaja et al., 2024).

1. Akses Air Bersih dan Sanitasi

Data PDAM Tirta Satria (2022) menyebutkan bahwa cakupan air bersih di wilayah kota mencapai 58,13% rumah tangga. Namun, di wilayah pinggiran seperti Sumbang dan Karanglewas, akses masih di bawah 40%. Selain itu, hanya 71,4% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (Ummah, 2019b).

2. Listrik dan Pelayanan Dasar

PLN UP3 Purwokerto mencatat bahwa rasio elektrifikasi mencapai 99,2%, tetapi beban jaringan masih timpang di beberapa wilayah padat. Pelayanan publik digital seperti *Lapor Banyumas*, *e-Dukcapil*, dan *SIPAS* dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan hingga 30% lebih cepat dibanding layanan konvensional (Amirrosyad, 2023).

3. Transportasi dan Mobilitas

Transportasi publik di Purwokerto masih belum optimal. Data Dishub (2022) menunjukkan hanya 19% warga kota menggunakan transportasi umum. Kemacetan di jalan utama seperti Jalan Soedirman dan Gerilya meningkat pada jam sibuk, dengan waktu tempuh rata-rata meningkat dari 12 menit (2017) menjadi 18 menit (2022) (Ummah, 2019c).

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

Ketimpangan dan Kesenjangan Infrastruktur

Meskipun pembangunan infrastruktur di pusat kota cukup pesat, masih terjadi kesenjangan antara wilayah inti (Purwokerto Timur-Barat) dan pinggiran (Ajibarang, Cilongok, Kalibagor) (Wiguna, 2016).

Tabel 3. *Ketimpangan dan Kesenjangan Infrastruktur*

Wilayah	Akses Air Bersih (%)	Internet (RT)	Transportasi Umum	Jalan Mantap (%)
Purwokerto Tengah	87,3	95%	Tersedia	94%
Kembaran	51,2	72%	Tidak tersedia	67%
Cilongok	38,4	60%	Tidak tersedia	58%
Sumbang	43,7	68%	Tidak tersedia	61%

Sumber: BPS Banyumas 2023, DPU Banyumas, Diskominfo Banyumas

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif, agar peningkatan kualitas hidup tidak hanya dirasakan oleh penduduk pusat kota, tetapi juga oleh warga pinggiran yang masih mengalami keterbatasan akses infrastruktur (Hariadi et al., 2007) (Ummah, 2019a).

Analisis Tematik dan Sintesis

Berdasarkan temuan penelitian, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas terbukti memberikan dampak yang bersifat multidimensional, yaitu pada aspek ekonomi, sosial, dan spasial. Dari sisi ekonomi, pembangunan jalan nasional, jalur ganda kereta api, serta digitalisasi layanan publik telah memacu aktivitas ekonomi lokal, khususnya melalui peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, kemajuan infrastruktur juga mendorong pertumbuhan pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner dan kerajinan, serta menurunkan biaya logistik hingga 17% sebagaimana dicatat dalam studi Brilyawan & Santosa (2021). Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur mampu mempercepat sirkulasi ekonomi dan memperluas pasar di wilayah perkotaan.

Dari sisi sosial pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan internet memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meski demikian, distribusi infrastruktur tersebut belum merata, terutama di wilayah

pinggiran kota seperti Kembaran, Cilongok, dan Sumbang, yang masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap air bersih dan konektivitas digital. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian keadilan sosial di daerah urban. Dari aspek spasial, pembangunan infrastruktur turut memperkuat konektivitas wilayah, baik melalui jalur transportasi utama maupun pengembangan fasilitas publik berbasis digital. Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan lebih terkonsentrasi di pusat kota (Purwokerto Tengah dan Purwokerto Timur), sedangkan wilayah pinggiran masih mengalami ketertinggalan dalam akses dan kualitas infrastruktur. Ketimpangan wilayah ini menimbulkan risiko eksklusi sosial dan ekonomi bagi kelompok masyarakat di daerah non-perkotaan.

Temuan ini memperkuat pandangan dalam teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Juhro & Trisnanto (2018), di mana investasi dalam infrastruktur dipandang sebagai salah satu determinan penting bagi peningkatan produktivitas lokal dan daya saing regional. Namun, jika tidak disertai dengan pendekatan keadilan spasial (*spatial justice*), pembangunan infrastruktur justru dapat memperdalam kesenjangan antarwilayah. Pembangunan ke depan harus dirancang tidak hanya berbasis pada efisiensi ekonomi, tetapi juga mengedepankan inklusivitas, pemerataan, dan keberlanjutan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil (Rapat Piter Sony Hutauruk, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan Kabupaten Banyumas, khususnya di kawasan Purwokerto, memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pada aspek ekonomi, infrastruktur fisik seperti jalan nasional, terminal tipe A, serta jalur ganda kereta api telah mempercepat arus distribusi barang dan jasa, mendorong pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa yang mencapai 38,5% (BPS, 2023), serta meningkatkan jumlah pelaku UMKM digital dari 1.600 pada tahun 2020 menjadi 3.521 unit pada tahun 2023 (Diskop UKM Banyumas, 2023). Pada aspek sosial, infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas digital publik mulai menunjukkan peningkatan kualitas layanan. Meskipun demikian, akses terhadap

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

infrastruktur tersebut masih belum merata, terutama di wilayah pinggiran kota yang cakupan air bersihnya masih di bawah 50%, serta terbatasnya koneksi internet yang stabil. Di sisi spasial, pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah inti perkotaan, menciptakan ketimpangan infrastruktur antara pusat dan pinggiran kota.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan layanan publik, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam pemerataan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur ke depan perlu mempertimbangkan prinsip keadilan spasial, partisipasi masyarakat, dan kesinambungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh penduduk kota.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerataan infrastruktur dasar pemerintah daerah perlu mengarahkan pembangunan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan jaringan digital ke wilayah-wilayah pinggiran seperti cilongok, sumbang, dan kalibagor agar tidak terjadi ketimpangan akses layanan publik.
2. Penguatan UMKM digital dan ekonomi lokal perluasan pelatihan dan pendampingan umkm berbasis digital perlu ditingkatkan, terutama di sektor non-inti kota, dengan memanfaatkan potensi pasar lokal dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.
3. Perencanaan berbasis data dan keadilan spasial setiap kebijakan pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada data spasial, indeks kemiskinan, dan kebutuhan sektoral masyarakat. Integrasi antara bappeda, dinas pupr, dan diskominfo menjadi kunci utama dalam perencanaan kota yang inklusif..

DAFTAR REFERENSI

- Amirrosyad, I. (2023). *Efektivitas Aplikasi Lapak Aduan Dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas)*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13531>
- Anwaruddin. (2009). Kajian Spesifikasi Arah Kebijakan Pembangunan Kota Purwokerto. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9*, 151–160.

- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya 2022. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- BPS Kabupaten Banyumas. (2023). Halaman Sampul Warna. *Kecamatan Patikraja Dalam Angka 2023*, 132.
- Brilyawan, K., & Santosa, P. B. (2021). Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal Of Economics*, 10(1), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/29998>
- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. (2017). *Guideline Masterplan Smart City: Gerakan Menuju 100 Smart City*.
- Hariadi, P., Bawono, I. R., & Arintoko. (2007). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Ekonomi Pembangunan*, 61–70.
- Hilba Yoga Pratama, H. Y. P., Sardjono, A. B., Sari, S. R., & Sudarsono, H. (2023). Implementasi Konsep Smart City Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Permasalahan Perkotaan (Studi Kasus: Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur). *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(2), 151–168. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i2.440>
- Husen, A., & Baranyanan, A. S. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan, Infrastruktur Jalan dan Infrastruktur Jembatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara. *Jurnal Poros Ekonomi*, X(1), 20–34.
- Ignatius Aji Dwiatmaja, Muhammad Imam Alfikri, & Irfan Khairan Ali. (2024). Studi kasus Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kehidupan Masyarakat Melalui Kacamata Sosiologi: Tanda Tanya Pembangunan Infrastruktur Jalur Kereta Api trans-Sulawesi. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 73–82. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.129>
- Juhro, S., & Trisnanto, B. (2018). Paradigma dan Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen Indonesia. *Publication-Bi*, 1–40. <http://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP112018.pdf>
- Kebijakan, N. (2024). *Tinjauan Strategis Logistik Darat di Indonesia*. November.
- KemkominKemkominfo. (2020). Laporan Kinerja Kemkominfo 2020.fo. (2020). *Laporan Kinerja Kemkominfo 2020*.
- Komunikasi, D., Informatika, D. A. N., & Tabel, D. (2023). *Renstra 2018 - 2023*.

DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS

- Nurdina, W. (2021). Infrastructure and Income Inequality in Indonesia: 2009-2017. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(2), 129–144. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i2.132>
- Operasional, E., Mikro, U., Mendrofa, L., Zandrato, B., & Zai, I. (2025). *PENGARUH DIGITALISASI PADA PENINGKATAN DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA*. 02, 100–108.
- Pokhrel, S. (2024). ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI 2 PROVINSI INDONESIA TAHUN 2015-2019. In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).
- Puncak Joyontono, 1)Subarno, 1)Reineta Puspitasari, 1)Tiara Handayani, 1)Asal Izmi, 1)Cut Ayu Tiara S, 1)M. Rifki Ghazali, 1)Ika Indah Karlina, 1)Muhammad Fitranata N, 2)Suprpto Dibyosaputro. (2023). *PELAYANAN INFORMASI PUBLIK*.
- Rapat Piter Sony Hutaaruk. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1). <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.118>
- Rosidin, I. S. (2021). *Inequality, Regional Economic Development and Access to Public Services in Decentralizing Indonesia*. <https://research.vu.nl/en/publications/inequality-regional-economic-development-and-access-to-public-ser>
- Sekretaris DPRD. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2022. *Science Signaling*, 11(551), 746–759. <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>
- Siswanto, H., Sulistio, H., Djakfar, L., & Wicaksono, A. (2016). Sistem Manajemen Jalan dan Kondisi Kerusakan Jalan di Indonesia : Sebuah Kajian Pustaka. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah IX (ATPW)*, 51–58.
- SYAHRIAR, M. S. (2018). *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen*. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/4712>

- Tari, K. S. (2020). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar (Studi Kasus Deskriptif pelebaran Jalan Di Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)*. 1–10.
- Ummah, M. S. (2019a). LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjLP). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ummah, M. S. (2019b). Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2022. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Ummah, M. S. (2019c). RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Umum, G., & Kabupaten, W. (n.d.). *Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal*.
- Wibowo, M. G., Urfiyya, K., Nurpasila, Ardiansyah, M., Muallim, A., Kusuma, T. B., Muhdir, I., Busman, Ma'as, M. H. M., Satibi, I., Mardianto, D., Adhim, M. A., Hanafi, S. M., Hasbi, Megantoro, A., Haris, A., Imam, M. S., Nasrullah, Afandi, M. Y., ... Mubarak, F. N. (2021). *Strategi Pembangunan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Indonesia*.
- Wiguna, D. P. (2016). Sebaran Disparitas Antar Daerah di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(2), 141–153.
<https://doi.org/10.17977/um002v8i22016p141>

**DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PENINGKATAN EKONOMI DAN KUALITAS HIDUP DI
PERKOTAAN: STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS**

Yunisvita, Y., Teguh, M., Chodijah, R., Imelda, I., & Kurniawan, A. (2021). Labor Market Structure in Indonesia: Segregation or Integration of Occupations? *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 42–53. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i1.12791>